BAB V

OUTPUT PENELITIAN

Menjangkau Lebih Luas, Menyasar Lebih Tepat: Rekomendasi Untuk Program Beasiswa Daerah

A. Ringkasan Eksekutif *(Executif Summary)*

Pemerintah Kota Makassar melalui program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi berupaya menekan angka anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi. Namun, hasil evaluasi menunjukkan program ini belum efektif menurunkan angka putus sekolah secara signifikan, karena keterbatasan jumlah beasiswa, distribusi yang belum merata, kurangnya sosialisasi, serta minimnya pelibatan sekolah dalam proses seleksi. Selain itu, penggunaan istilah anak lorong tidak mencerminkan sasaran program secara tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sebagai respon, diperlukan kebijakan strategis berupa peningkatan kuota dan anggaran beasiswa, perluasan akses pendidikan non-formal seperti PKBM dan program kejar paket, serta pelaksanaan sosialisasi berlapis melalui berbagai jalur komunikasi agar lebih inklusif. Selain itu, mekanisme rekomendasi sekolah perlu diperkuat untuk memastikan seleksi yang adil dan tepat sasaran, ditambah dengan sistem komunikasi terpadu agar sekolah terinformasi secara real time. Terakhir, evaluasi penamaan program perlu dilakukan untuk memastikan bahwa istilah yang digunakan mencerminkan target penerima secara jelas dan transparan. Dengan rekomendasi ini, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan benar-benar berkontribusi dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kota Makassar.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai

B. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang merata dan bermutu, termasuk melalui program wajib belajar sembilan tahun. Namun, kenyataannya masih banyak anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 175.048 anak tidak bersekolah di Sulawesi Selatan, dengan Kota Makassar sebagai penyumbang tertinggi, yakni 35.948 anak, di mana 18.367 di antaranya tercatat sebagai anak putus sekolah.

Sebagai respon terhadap masalah tersebut, pemerintah kota Makassar meluncurkan program “1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi” Program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan dan anak yang berprestasi. Program ini ditargetkan memberikan beasiswa kepada 400 anak yang terbagi 200 anak SD dan 200 anak SMP setiap tahunnya di 15 kecamatan kota Makassar, dan program ini telah berjalan selama tiga tahun. Meski program ini sesuai dengan target kuantitatif yang tercantum dalam RPJMD 2021–2026. Namun, angka anak putus sekolah di kota Makassar masih terbilang cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup signifikan dalam menurunkan angka putus sekolah secara keseluruhan di kota Makassar.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar jumlah dan penanganan anak putus sekolah di Kota Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi ankga anak putus

sekolah dengan adanya pembuatan beasiswa 1000 anak lorong berprestasi yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar menjawab tantangan ini melalui program Beasiswa 1000 Anak lorong berprestasi yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yang berprestasi. Meskipun program ini telah berjalan selama bertahun-tahun dan masuk dalam RPJMD 2021-2026, namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program ini belum dapat mencapai tujuannya secara efektif, terutama dalam menekan angka putus sekolah, seperti :

1. Program belum berdampak dalam menurunkan angka anak putus sekolah di Kota Makassar.

   Masalah utamanya adalah bahwa program tersebut belum secara nyata mengurangi jumlah anak putus sekolah secara signifikan. Meskipun telah memberikan 400 beasiswa setiap tahun, data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah masih tinggi dan akan mencapai 18.367 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara jumlah penerima manfaat dan kebutuhan nyata dilapangan. Beasiswa yang diberikan belum mampu untuk menjangkau sebagian besar anak kurang mampu. Sehingga belum dapt memberikan kontribusi banyak untuuk mengubah kondisi pendidikan secara keseluruhan.

2. Distribusi beasiswa belum merata

   Dikarenakan kuota penerima beasiswa masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan dan beberapa siswa yang juga layak tapi belum terjangkau oleh program beasiswa ini. Jumlah penerima beasiswa ini dibatasi hanya untuk 400 anak per tahun, jauh lebih sedikit dari jumlah total anak yang membutuhkan bantuan pendidikan di 15

kecamatan di Kota Makassar. Akibatnya, program ini kehilangan banyak anak yang memenuhi kriteria beasiswa, baik dari segi kebutuhan finansial maupun prestasi akademik. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam penerimaan manfaat program.

3. Kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi terkait beasiswa

Beberapa keluarga yang sangat membutuhkan bantuan beasiswa tidak memiliki informasi yang memadai atau tidak tahu bahwa program ini ada. Kurangnya sosialisasi, ditambah dengan prosedur verifikasi dan validasi data yang tidak memadai, telah mengakibatkan banyak anak yang kurang mampu tidak dimasukkan dalam daftar penerima manfaat. Proses pendaftaran sebagian besar dipimpin oleh pemerintah, kurang melibatkan masyarakat secara efektif, sehingga menyulitkan proses seleksi untuk disesuaikan secara efektif dengan kondisi nyata dilapangan.

4. Kurangnya keterlibatan pihak sekolah dalam proses seleksi untuk beasiswa ini.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi para guru dan pihak sekolah. Beberapa guru bahkan mengaku tidak mendapatkan informasi hingga Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa siswanya telah menerima beasiswa. Kurangnya keterlibatan ini memengaruhi keakuratan data dan mengurangi efektivitas program karena sekolah sebagai lembaga yang paling dekat dengan siswa harusnya berpartisipasi aktif dalam menyeleksi siswa yang paling layak untuk menerima beasiswa.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menanggulangi masalah pendidikan, namun masih diperlukan banyak perbaikan dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam sangat

diperlukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar mencapai tujuannya dan berdampak nyata dalam menekan angka putus sekolah di Kota Makassar.

D. Rekomendasi

1. Keberlanjutan beasiswa dengan mengkhususkan untuk anak putus sekolah dan peningkatan kuota serta anggaran dari beasiswa ini.

Masalah utamanya adalah bahwa program tersebut belum secara nyata mengurangi jumlah anak putus sekolah secara signifikan. Selama ini, program hanya menyasar anak-anak yang masih aktif bersekolah, padahal data menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Kota Makassar masih cukup tinggi. Dengan memfokuskan program kepada mereka yang telah putus sekolah, beasiswa ini akan lebih tepat sasaran dan berkontribusi langsung dalam menekan angka putus sekolah.

Selain itu, peningkatan kuota penerima dan penambahan alokasi anggaran menjadi hal yang penting agar cakupan program bisa diperluas. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau oleh program ini karena terbatasnya jumlah penerima setiap tahunnya. Dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah maupun potensi kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah perlu didorong guna memperkuat jangkauan dan keberlangsungan program ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan menargetkan khusus bagi anak putus sekolah, yang dapat didampingi untuk kembali mengakses pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini bukan hanya selaras dengan tujuan awal program, tetapi juga sejalan dengan amanat pendidikan dan pemerataan akses belajar.

2. Sosialisasi Berlapis

Pelaksanaan sosialisasi secara berlapis sangat penting agar informasi program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang tinggal di wilayah lorong atau kawasan rentan. Sosialisasi berlapis ini mencakup pemanfaatan berbagai media dan saluran komunikasi, seperti media sosial resmi pemerintah, grup WhatsApp warga, serta radio komunitas untuk menjangkau anak muda dan masyarakat digital.

Selain itu, pengumuman langsung di sekolah, dan balai warga perlu dimaksimalkan agar orang tua yang tidak aktif di media sosial tetap mendapat informasi memadai. Melalui keterlibatan RT/RW dan tokoh masyarakat, pesan program beasiswa akan lebih dipercaya dan mudah diterima oleh warga.

Dengan pola sosialisasi berlapis ini, tidak ada pihak yang merasa terlewatkan atau tidak tahu informasi program. Hal ini juga dapat menekan risiko salah sasaran penerima akibat kurangnya informasi di tingkat masyarakat bawah, sehingga program dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan transparan.

3. Mekanisme Rekomendasi Sekolah

Setiap calon penerima beasiswa sebaiknya diwajibkan memperoleh surat rekomendasi dari sekolah asalnya, sebagai syarat administrasi dan validasi awal. Dengan cara ini, pihak sekolah terlibat aktif dalam proses seleksi dan dapat memantau siapa saja siswanya yang mengajukan atau mendapatkan bantuan. Mekanisme ini juga membantu memastikan data siswa benar-benar valid, sesuai kebutuhan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan beasiswa oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, rekomendasi sekolah dapat memperkuat rasa tanggung jawab bersama antara dinas

pendidikan dan sekolah dalam memastikan beasiswa tepat sasaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program di mata masyarakat.

4. Komunikasi Terpadu Penyaluran Beasiswa

Dinas pendidikan perlu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti WhatsApp blast atau SMS gateway untuk mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah terkait daftar siswa yang diusulkan maupun yang telah disetujui menerima beasiswa. Mekanisme ini jauh lebih efisien dibandingkan harus melakukan rapat berkali-kali, yang kerap memakan waktu dan biaya.

Selain itu, dinas pendidikan juga dapat membentuk grup komunikasi berbasis aplikasi (seperti WhatsApp atau Telegram) yang berisi perwakilan sekolah dan pejabat terkait, agar koordinasi berjalan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya komunikasi terpadu penyaluran beasiswa ini, sekolah akan selalu terinformasikan secara real time, dapat segera mengonfirmasi data siswa, serta turut mengawasi penyaluran beasiswa agar tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan komunikasi antar pihak.

E. Kesimpulan

Program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi adalah upaya Pemkot Makassar untuk mendukung pendidikan anak kurang mampu dan berprestasi. Namun, angka anak putus sekolah masih tinggi, menunjukkan program belum berdampak signifikan. Beberapa kendala utama di antaranya adalah terbatasnya kuota dibandingkan kebutuhan nyata, distribusi beasiswa yang belum merata, kurangnya sosialisasi dan informasi ke masyarakat, minimnya keterlibatan sekolah dalam proses seleksi, serta ketidaktepatan definisi sasaran program yang tidak secara eksklusif menyasar anak lorong.

Dengan demikian, program ini memerlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Perlu strategi lanjutan seperti peningkatan kuota beasiswa, penguatan jalur pendidikan alternatif, sosialisasi berlapis, rekomendasi sekolah sebagai validasi penerima, komunikasi terpadu, hingga evaluasi ulang penamaan program agar lebih transparan dan inklusif.Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program dapat lebih efektif menekan angka putus sekolah dan memenuhi hak pendidikan anak di Kota Makassar secara adil dan merata.

F. Daftar Pustaka

"RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026." n.d.

REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah.

REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

G. *Output Policy Brief*

Gambar 11
Infografis *Policy Brief*





RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)







Pemerintah Kota Makassar melalui program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi berupaya menekan angka anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi. Namun, hasil evaluasi menunjukkan program ini belum efektif menurunkan angka putus sekolah secara signifikan, karena keterbatasan jumlah beasiswa, distribusi yang belum merata, kurangnya sosialisasi, serta minimnya pelibatan sekolah dalam proses seleksi. Selain itu, penggunaan istilah anak lorong tidak mencerminkan sasaran program secara tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sebagai respon, diperlukan kebijakan strategis berupa peningkatan kuota dan anggaran beasiswa, perluasan akses pendidikan non-formal seperti PKBM dan program kejar paket, serta pelaksanaan sosialisasi berlapis melalui berbagai jalur komunikasi agar lebih inklusif. Selain itu, mekanisme rekomendasi sekolah perlu diperkuat untuk memastikan seleksi yang adil dan tepat sasaran, ditambah dengan sistem komunikasi terpadu agar sekolah terinformasi secara real time. Terakhir, evaluasi penamaan program perlu dilakukan untuk memastikan bahwa istilah yang digunakan mencerminkan target penerima secara jelas dan transparan. Dengan rekomendasi ini, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan benar-benar berkontribusi dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kota Makassar.



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang merata dan bermutu, termasuk melalui program wajib belajar sembilan tahun. Namun, kenyataannya masih banyak anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 175.048 anak tidak bersekolah di Sulawesi Selatan, dengan Kota Makassar sebagai penyumbang tertinggi, yakni 35.948 anak, di mana 18.367 di antaranya tercatat sebagai anak putus sekolah.



Sebagai respon terhadap masalah tersebut, pemerintah kota Makassar meluncurkan program "1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi" Program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan dan anak yang berprestasi. Program ini ditargetkan memberikan beasiswa kepada 400 anak yang terbagi 200 anak SD dan 200 anak SMP setiap tahunnya di 15 kecamatan kota Makassar, dan program ini telah berjalan selama tiga tahun. Meski program ini sesuai dengan target kuantitatif yang tercantum dalam RPJMD 2021–2026. Namun, angka anak putus sekolah di kota Makassar masih terbilang cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup signifikan dalam menurunkan angka putus sekolah secara keseluruhan di kota Makassar.



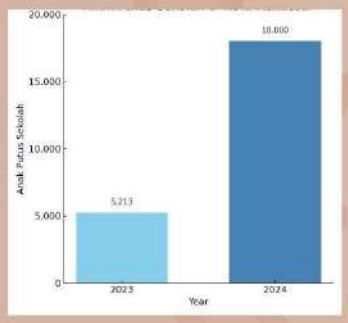


DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar jumlah dan penanganan anak putus sekolah di Kota Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi angkaa anak putus sekolah dengan adanya pembuatan beasiswa 1000 anak lorong berprestasi yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menjawab tantangan ini melalui program Beasiswa 1000 Anak lorong berprestasi yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak yang berprestasi. Meskipun program ini telah berjalan selama bertahun-tahun dan masuk dalam RPJMD 2021-2026, namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program ini belum dapat mencapai tujuannya secara efektif, terutama dalam menekan angka putus sekolah, seperti :

1. Program belum berdampak dalam menurunkan angka anak putus sekolah di Kota Makassar.

Masalah utamanya adalah bahwa program tersebut belum secara nyata mengurangi jumlah anak putus sekolah secara signifikan. Meskipun telah memberikan 400 beasiswa setiap tahun, data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah masih tinggi dan akan mencapai 18.367 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara jumlah penerima manfaat dan kebutuhan nyata dilapangan. Beasiswa yang diberikan belum mampu untuk menangkau sebagian besar anak kurang mampu. Sehingga belum dapt memberikan kontribusi banyak untuk mengubah kondisi pendidikan secara keseluruhan.





2. Distribusi beasiswa belum merata

Dikarenakan kuota penerima beasiswa masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan dan beberapa siswa yang juga layak tapi belum terjangkau oleh program beasiswa ini. Jumlah penerima beasiswa ini dibatasi hanya untuk 400 anak per tahun, jauh lebih sedikit dari jumlah total anak yang membutuhkan bantuan pendidikan di 15 kecamatan di Kota Makassar. Akibatnya, program ini kehilangan banyak anak yang memenuhi kriteria beasiswa, baik dari segi kebutuhan finansial maupun prestasi akademik. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan kesenangan sosial dalam penerimaan manfaat program.



3. Kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi terkait beasiswa

Beberapa keluarga yang sangat membutuhkan bantuan beasiswa tidak memiliki informasi yang memadai atau tidak tahu bahwa program ini ada. Kurangnya sosialisasi, ditambah dengan prosedur verifikasi dan validasi data yang tidak memadai, telah mengakibatkan banyak anak yang kurang mampu tidak dimasukkan dalam daftar penerima manfaat. Proses pendaftaran sebagian besar dipimpin oleh pemerintah, kurang melibatkan masyarakat secara efektif, sehingga menyulitkan proses seleksi untuk disesuaikan secara efektif dengan kondisi nyata dilapangan.



3. Beasiswa anak lorong berprestasi ini bukan di khususkan untuk anak lorong (hanya istilah)

Terdapat masalah pada aspek definisi dan target sasaran program "Beasiswa Anak Lorong Berprestasi" tidak secara eksklusif menyasar anak-anak lorong. Nama program ini dinilai lebih bersifat simbolis saja sementara dalam praktiknya, tidak semua penerima berasal dari kawasan lorong. Beberapa siswa yang bukan berasal dari lorong tetap bisa mendapatkan beasiswa ini, sementara anak-anak yang benar-benar tinggal di wilayah lorong yang padat dan miskin belum tentu mendapatkannya. Ketidaktepatan target sasaran ini memperkuat dugaan bahwa program masih memiliki kelemahan dalam akurasi perencanaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menanggulangi masalah pendidikan, namun masih diperlukan banyak perbaikan dalam pelaksanaannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar mencapai tujuannya dan berdampak nyata dalam menekan angka putus sekolah di Kota Makassar.

4. Kurangnya keterlibatan pihak sekolah dalam proses seleksi untuk beasiswa ini.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi para guru dan pihak sekolah. Beberapa guru bahkan mengaku tidak mendapatkan informasi hingga Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa siswanya telah menerima beasiswa. Kurangnya keterlibatan ini memengaruhi keakuratan data dan mengurangi efektivitas program karena sekolah sebagai lembaga yang paling dekat dengan siswa, banyanya berpartisipasi aktif dalam menyeleksi siswa yang paling layak untuk menerima beasiswa.



REKOMENDASI KEBIJAKAN



Keberlanjutan beasiswa dengan mengkhususkan untuk anak putus sekolah dan peningkatan kuota serta anggaran dari beasiswa ini.

Masalah utama program ini adalah belum mampu menurunkan angka anak putus sekolah secara signifikan karena hanya menyasar siswa yang masih aktif. Padahal, jumlah anak putus sekolah di Kota Makassar masih tinggi. Oleh karena itu, perlu penyesuaian kebijakan agar beasiswa ini difokuskan pada anak yang sudah putus sekolah dan didampingi untuk kembali bersekolah, baik secara formal maupun non-formal. Selain itu, peningkatan kuota dan anggaran sangat penting agar lebih banyak anak kurang mampu dapat dijangkau. Dukungan dari pemerintah daerah serta kolaborasi dengan sektor swasta perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan program.



Memperkuat dan memperluas akses pendidikan alternative dan sekolah non-formal seperti PKBM, Program kejar Paket (A, B dan C).

Pemerintah dapat berupaya memperkuat dan memperluas kesempatan pendidikan nonformal, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, Pogram kejar paket A, B, C, dan ruang kelas fleksibel untuk anak usia sekolah yang bekerja atau terlambat sekolah. Tujuannya menyediakan opsi pendidikan yang fleksibel bagi anak putus sekolah guna memastikan mereka tetap dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

SOSIALISASI BERLAPIS

Pelaksanaan sosialisasi secara berlapis sangat penting agar informasi program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang tinggal di wilayah lorong atau kawasan rentan. Sosialisasi berlapis ini mencakup pemanfaatan berbagai media dan saluran komunikasi, seperti media sosial resmi pemerintah, grup WhatsApp warga, serta radio komunitas untuk menjangkau anak muda dan masyarakat digital.

Selain itu, pengumuman langsung di sekolah, dan balai warga perlu dimaksimalkan agar orang tua yang tidak aktif di media sosial tetap mendapat informasi memadai. Melalui keterlibatan RT/RW dan tokoh masyarakat, pesan program beasiswa akan lebih dipercaya dan mudah diterima oleh warga.

Dengan pola sosialisasi berlapis ini, tidak ada pihak yang merasa terlewatkan atau tidak tahu informasi program. Hal ini juga dapat menekan risiko salah sasaran penerima akibat kurangnya informasi di tingkat masyarakat bawah, sehingga program dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan transparan.



MEKANISME REKOMENDASI SEKOLAH

Setiap calon penerima beasiswa sebaiknya diwajibkan memperoleh surat rekomendasi dari sekolah asalnya, sebagai syarat administrasi dan validasi awal. Dengan cara ini, pihak sekolah terlibat aktif dalam proses seleksi dan dapat memantau siapa saja siswanya yang mengajukan atau mendapatkan bantuan. Mekanisme ini juga membantu memastikan data siswa benar-benar valid, sesuai kebutuhan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan beasiswa oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, rekomendasi sekolah dapat memperkuat rasa tanggung jawab bersama antara dinas pendidikan dan sekolah dalam memastikan beasiswa tepat sasaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program di mata masyarakat.



Komunikasi Terpadu Penyaluran Beasiswa

Dinas pendidikan perlu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti WhatsApp untuk mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah terkait daftar siswa yang diusulkan maupun yang telah disetujui menerima beasiswa. Mekanisme ini jauh lebih efisien dibandingkan harus melakukan rapat berkali-kali, yang kerap memakan waktu dan biaya.

Selain itu, dinas pendidikan juga dapat membentuk grup komunikasi berbasis aplikasi (seperti WhatsApp atau Telegram) yang berisi perwakilan sekolah dan pejabat terkait, agar koordinasi berjalan lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya komunikasi terpadu penyaluran beasiswa ini, sekolah akan selalu terinformasikan secara real time, dapat segera mengonfirmasi data siswa, serta turut mengawasi penyaluran beasiswa agar tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan komunikasi antar pihak.



Evaluasi Penamaan Program

Perlu dilakukan evaluasi terhadap penamaan program "1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi" untuk memastikan bahwa nama tersebut benar-benar sesuai dengan realitas sasaran program. Jika program ini pada praktiknya terbuka bagi semua siswa kurang mampu dan siswa yang berprestasi, tanpa memprioritaskan anak-anak yang tinggal di lorong atau kawasan rentan, maka penggunaan kata anak lorong dapat menimbulkan kesalahpahaman publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah bersama stakeholder pendidikan perlu mempertimbangkan pergantian nama program ke istilah yang lebih jujur dan inklusif, misalnya Beasiswa Prestasi Terbuka, agar transparan, jelas, dan mencerminkan siapa sebenarnya yang menjadi prioritas penerima. Dengan begitu, masyarakat tidak keliru menafsirkan sasaran beasiswa, serta citra program pemerintah tetap positif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi nama program juga membantu menghindari potensi perdebatan di kemudian hari, terutama jika publik merasa bahwa label "anak lorong" hanya dijadikan gimmick tanpa bukti nyata pemerataan penerima beasiswa.



KESIMPULAN



Program 1000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi adalah upaya Pemkot Makassar untuk mendukung pendidikan anak kurang mampu dan berprestasi. Namun, angka anak putus sekolah masih tinggi, menunjukkan program belum berdampak signifikan. Beberapa kendala utama di antaranya adalah terbatasnya kuota dibandingkan kebutuhan nyata, distribusi beasiswa yang belum merata, kurangnya sosialisasi dan informasi ke masyarakat, minimnya keterlibatan sekolah dalam proses seleksi, serta ketidaktepatan definisi sasaran program yang tidak secara eksklusif menyasar anak lorong.

Dengan demikian, program ini memerlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Perlu strategi lanjutan seperti peningkatan kuota beasiswa, penguatan jalur pendidikan alternatif, sosialisasi berlapis, rekomendasi sekolah sebagai validasi penerima, komunikasi terpadu, hingga evaluasi ulang penamaan program agar lebih transparan dan inklusif.Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program dapat lebih efektif menekan angka putus sekolah dan memenuhi hak pendidikan anak di Kota Makassar secara adil dan merata.



Daftar Pustaka

"RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026." n.d.

REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberian Beasiswa Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah.